

INCLUSIVE EDUCATION IMPLEMENTATION AT SDN SUMBERSARI 1 MALANG

(Implementasi Pendidikan Inklusif Pada SDN Sumbersari 1 Kota Malang)

Dina Astika Fitriana^{*1}
Sulthoni^{*2}

¹SLB Negeri Ponorogo
²Universitas Negeri Malang
Email: Dina_Astika777@yahoo.co.id

Abstrac: This research focus was the implementation of inclusive education at SDN Malang Sumbersari I in terms of: (1) student participant, (2) educators and education personnel, (3) curriculum, (4) classroom management, (5) learning activities, (6) evaluation and reporting system of learning outcomes and (7) the factors supporting and inclusive education in SDN Sumbersari I Malang. Results from this study were: (1) annually SDN Sumbersari I receive children with special needs in maximum of 2 students, (2) the educators receive training on inclusive education from the education department, (3) the curriculum used is curriculum accommodating, (4) the classroom management is based on the needs of children with special needs, (5) the learning process is adapted from the design of Individual Education Program, (6) determining children with special needs with continuous learners, and there are two types of reports on the results of learning, they are numeral and description, (7) supporting factor are the concern of parents and government, inhibiting factor are the parents who do not care and the vagueness of government regulation.

Keywords: implementation of inclusive education

Abstrak: Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pendidikan inklusif pada SDN Sumbersari 1 Kota Malang ditinjau dari peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan kelas, kegiatan pembelajaran, evaluasi dan kenaikan kelas serta faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian: (1) setiap tahunnya menerima maksimal 2 ABK, (2) tenaga pendidik mendapatkan pelatihan pendidikan inklusif, (3) menggunakan kurikulum akomodatif, (4) pengelolaan kelas disesuaikan kebutuhan ABK, (5) proses pembelajaran disesuaikan PPI, (6) ABK ditentukan berkelanjutan laporan hasil belajar menggunakan angka dan deskriptif, (7) faktor pendukung: kepedulian orangtua, dan pemerintah, factor penghambat: orang tua yang tidak peduli serta tidak jelasnya peraturan.

Kata Kunci: implementasi pendidikan inklusif

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia diharapkan mampu mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk mendorong terwujudnya hal tersebut, telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwasannya tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Pada UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwasannya tiap-tiap warga negara artinya adalah setiap warga negara tanpa terkecuali berhak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab III pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Selanjutnya pada Bab IV Pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dilanjutkan pada ayat kedua bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Oleh karena seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, maka pemerataan pendidikan juga harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual atau yang disebut dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Pesertadidik yang memiliki kebutuhan khusus

dapat memperoleh pendidikan mereka di SLB ataupun SDLB. SLB adalah sekolah khusus yang pada awal berdirinya menyelenggarakan pendidikan hanya bagi peserta didik dengan jenis kelainan yang sama (Direktorat PKLK, 2013:10). Sedangkan SDLB adalah sekolah khusus yang menampung berbagai jenis ketunaan (Direktorat PKLK, 2013:10). Namun SLB ataupun SDLB berdampak pada perkembangan aspek sosial ABK, karena terbatasnya interaksi sosial antara siswa ABK dengan siswa reguler. Selain itu lokasi SLB berada di kabupaten ataupun kota, sedangkan ABK tersebar sampai ke kecamatan ataupun desa. Untuk memfasilitasi ABK yang tidak hanya ada di kota ataupun kabupaten, maka diperlukan sekolah untuk memperoleh pendidikan bagi ABK yang dengan mudah dapat diakses oleh ABK. Sekolah yang dapat diakses dengan mudah oleh ABK adalah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif.

Dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sedangkan menurut PKLK (2013:11), pendidikan inklusif merupakan suatu filosofi pendidikan sosial dan di dalam pendidikan inklusif semua orang berharga meskipun berbeda-beda.

Pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan kepada ABK untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya, serta mewujudkan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif (Permendiknas No 70 Tahun 2009 ayat 2). Selain itu, dalam buku Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Provinsi Jawa Timur (2012 : 6), menambahkan bahwa pendidikan inklusif bertujuan membangun karakter, nilai dan norma bagi semua peserta didik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusi diselenggarakan dengan menyesuaikan komponen-komponen yang dapat diselenggarakan ataupun dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan ABK. Komponen yang dapat disesuaikan adalah: (1) peserta didik. Pada sekolah inklusif, peserta didik bukan hanya non ABK saja, tetapi juga peserta didik ABK dengan kategori tunanetra,

tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya dan tunaganda (Budiyono, 2013:18). Dalam menentukan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik ABK, maka diperlukan identifikasi dan asesmen. Identifikasi dan asesmen ini dilakukan oleh guru maupun tenaga profesional (PKLK, 2013: 19). Asesmen yang telah dilakukan pada ABK akan berfungsi sebagai perencanaan pembelajaran individu, dasar evaluasi dan mentoring, serta pengalihanganan (PKLK, 2013: 20). (2) Kurikulum yang digunakan oleh sekolah inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum standar nasional (Budiyono, 2013: 20), namun, karena peserta didik ABK memiliki hambatan yang bervariasi dan kebutuhan yang bervariasi, maka diperlukanlah kurikulum akomodatif yang merupakan kurikulum standar nasional yang disesuaikan dengan bakat, minat, potensi peserta didik ABK (PKLK, 2013: 23). Pengembangan kurikulum akomodatif dapat dilakukan dengan cara duplikasi, modifikasi, substitusi, omisi, pada setiap komponen kurikulum (Budiyono, 2013: 78). (3) Ketenagaan baik pendidik maupun kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan ABK, sehingga pemerintah wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan kependidikan (PKLK, 2013: 31) serta menyediakan GPK (Guru Pembimbing Khusus) pada sekolah inklusif. (4) Pengelolaan penempatan peserta didik ABK dalam sekolah inklusif terdapat 6 model, yaitu: (a) kelas reguler (inklusi penuh) ABK bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama, (b) kelas reguler dengan *cluster*: ABK belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus, (c) kelas reguler dengan *pull out*: ABK belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus, (d) kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out* ABK belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus, (e) kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian: ABK belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler, (f) kelas khusus penuh ABK belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler (Depdiknas dalam Astuti, 2009:

11). (5) Kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusif meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Proses pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rancangan perangkat pembelajaran (PKLK, 2013: 33). (6) Evaluasi dan laporan hasil belajar. evaluasi merupakan proses sistematis pengumpulan informasi, menganalisis. Dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan baik berupa angka dan deskriptif naratif (PKLK, 2013: 34). Jadi bentuk laporan hasil belajar peserta didik ABK di sekolah inklusif ada 2, yaitu angka dan deskriptif (PKLK, 2013: 35).

Pemerintah Kota Malang pada tahun 2001 merintis sekolah inklusi. SDN Sumbersari 1 Kota Malang merupakan SD inklusi yang telah ditunjuk oleh dinas pendidikan Kota Malang dari tahun 2001. Pada observasi pendahuluan, SDN Sumbersari 1 Kota Malang, di kemukakan bahwa pada awal pelaksanaan pendidikan inklusif di SD ini, guru belum memiliki kompetensi di bidang ABK maupun ke-inklusi-an, sehingga guru belajar secara otodidak, selanjutnya guru mendapatkan pelatihan dari dinas pendidikan. Pada saat SDN Sumbersari 1 sudah di tujuk sebagai sekolah inklusi, peserta didik ABK bukan hanya berasal dari input peserta didik baru saja, tetapi juga mendapatkan input peserta didik ABK dari pindahan sekolah reguler lainnya. Hingga saat ini SDN Sumbersari 1 terdapat 13 ABK dengan berbagai macam ketunaan. Pada tahun ajaran 2013/2014 lalu, ada 3 peserta didik ABK yang mampu mengikuti ujian nasional, dan 1 peserta didik ABK yang mengikuti ujian sekolah.

Secara Khusus bagi peneliti, keberadaan SDN Sumbersari 1 Kota Malang tersebut menjadi hal yang menarik untuk dicermati serta di ungkap untuk dijelaskan, karena sebagai sekolah inklusi, SDN Sumbersari 1 menjadi SD perintis, sebagai pusat inklusi di gugus IV serta percontohan sekolah inklusi di Kota Malang. Selain hal tersebut, keberhasilan pengelolaan sekolah dalam mengelola pendidikan inklusif menjadi daya tarik untuk dicermati dan diteliti lebih dalam. Dari uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pendidikan Inklusif di SDN Sumbersari I Kota Malang”**

Berdasarkan uraian diatas, fokus penelitian ini adalah implementasi pendidikan inklusif pada SDN Sumbersari 1 Kota Malang. Adapun fokus penelitian tersebut terinci sebagai berikut: Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada SDN Sumbersari 1 Kota Malang ditinjau dari: (1) pesertadidik, (2) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, (3) kurikulum, (4) pengelolaan kelas, (5) kegiatan pembelajaran, (6)

sisten evaluasi dan sistem kenaikan kelas, (7) faktor pendukung dan penghambat pendidikan inklusif di SDN Sumbersari I Kota Malang

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu, “Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif, yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2013: 4). Penelitian ini dilakukan dalam setting ilmiah yaitu pada SDN Sumbersari 1 Kota Malang.

Sedangkan rancangan penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Wiyono (2007:77) menyatakan bahwa “ studi kasus merupakan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif dan terperinci suatu gejala atau unit sosial tertentu, seperti individu, kelompok, komunitas atau lembaga”. Studi kasus yang dilakukan di SDN Sumbersari 1 Kota Malang ini untuk menyelidiki, mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif dan terperinci implementasi pendidikan inklusif di sekolah ini.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Proses analisis dengan cara sebagai berikut: (1) reduksi data, (2) display data, (3) verifikasi data (Miles dan Huberman dalam Wiyono, 2007: 93). Pengecekan keabsahan data dengan cara: (1) triangulasi sumber, (2) triangulasi metode, (3) serta ketekunan pengamatan (Moleong, 2009:321).

Hasil

Berdasarkan paparan data yang telah dikemukakan di atas, maka diperoleh hasil temuan penelitian sebagai berikut.

Tabel 1: Temuan Penelitian di SDN Sumber Sari 1 Kota Malang

No	Aspek Temuan	Uraian
1	Peserta didik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 5 klasifikasi Peserta didik ABK, yaitu tunagrahita, tunadaksa, autisme, ADHD dan <i>Speech Delay</i> 2. Setiap tahun ajaran baru menerima peserta didik ABK maksimal 2, kecuali tahun 2009 tidak menerima ABK karena kuota ABK sudah penuh 3. Sekolah menerima klasifikasi ABK berdasarkan kemampuan sekolah. 4. Sekolah bekerjasama dengan pihak Psikolog untuk melakukan identifikasi dan asesmen ABK 5. Manager Inklusi, GPK dan guru kelas 1 melakukan asesmen kepada calon peserta didik ABK 6. Identifikasi dan asesmen dijadikan dasar dalam menentukan program layanan kompensatori serta akademik 7. Identifikasi dan asesmen dijadikan dasar untuk menentukan sarana prasarana dan tenaga pendidik
2	Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi akademik GPK adalah 1. S1 Psikologi, 2. Mahasiswa PLB semester IV 2. Jumlah GPK dirasa tidak sesuai dengan jumlah rasio peserta didik ABK 3. Pembagian jadwal anatar GPK 4. Guru reguler yang menangani ABK sudah mendapatkan pelatihan 5. Dinas pendidikan Kota Malang setiap satu bulan sekali mengadakan pertemuan ataupun pelatihan bagi ABK.
3	Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi peserta didik ABK yang tidak mampu mengikuti kurikulum nasional, maka dilakukan pengembangan kurikulum 2. Digunakan PPI untuk peserta didik ABK 3. PPI dirancang berdasarkan hasil asesmen 4. Yang membuat PPI adalah GPK dengan berkonsultasi dengan guru reguler 5. Terdapat kurikulum kekhususan di SDN Sumber Sari 1 kota Malang 6. Layanan kekhususan terdiri dari bina diri dan, belajar fokus, dan belajar berani
4.	Pengelolaan Kelas	Ada 4 model penempatan peserta didik ABK di sekolah ini, yaitu, model kelas reguler dengan <i>pull out</i> , model kelas reguler dengan <i>cluster</i> dan <i>pull out</i> , kelas reguler penuh, model penempatan kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian
5.	Kegiatan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di kelas reguler maupun khusus menggunakan PPI 2. Guru reguler menyampaikan PPI dari GPK ketika pembelajaran ABK di kelas reguler 3. Ada <i>shadow</i> yang menpampingi ABK selama proses pembelajaran 4. Di kelas reguler, penggunaan media pembelajaran sama dengan peserta didik reguler 5. Pembelajaran di kelas khusus dilakukan secara individual 6. Penggunaan media pembelajaran di kelas khusus bersifat fleksibel 7. Evaluasi pembelajaran ABK di kelas reguler KKM diturunkan 8. Ada aspek tambahan nilai bagi ABK, yaitu emosional dan lemandirian
6.	Sistem Kenaikan Kelas dan Sistem Laporan Hasil Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. ABK ditentukan berkelanjutan dan tidak ada yang tinggal kelas 2. Bagi ABK yang mampu mengikuti ujian nasional, maka diikutkan ujian nasional, tetapi jika tidak mampu diikutkan ujian sekolah 3. Laporan hasil belajar ABK ada 2, yaitu nilai berupa angka dan deskriptif
7	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendidikan Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah orangtua ABK yang kooperatif dan perpustakaan, teman dan warga yang menerima ABK serta kepedulian dari pemerintah 2. Faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah orang tua yang tidak kooperatif dan ketidakjelasan peraturan mengenai pendidikan inkluaif

Pembahasan

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN Sumber Sari 1 Kota Malang Ditinjau dari Peserta Didik

Klasifikasi peserta didik ABK di SDN Sumber Sari 1 berdasarkan hasil identifikasi terdiri dari.

Tabel 2: data siswa berkebutuhan khusus tahun pelajaran 2014/2015

No	Kelas	Klasifikasi ABK	Jumlah
1	1	Tuna Daksa	1
2	1	Speech Delay	1
3	2	Tuna Grahita	1
4	3	Tuna Grahita	3
5	4	Tuna Grahita	2
6	4	ADHD	1
7	5	Tuna Grahita	1
8	6	Tuna Grahita	1
9	6	Autis	2

SDN Sumber Sari 1 setia tahunnya menerima maksimal 2 peserta didik ABK dengan berbagai jenis klasifikasi ABK, namun hanya menerima yang sesuai dengan kemampuan pihak sekolah. Penerimaan peserta ini sesuai dengan permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal v ayat 1, yang berbunyi “Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah”

Dalam proses penerimaan peserta didik ABK, sekolah mengarahkan kepada orang tua calon peserta didik ABK untuk melakukan identifikasi dan asesmen kepada pihak yang lebih berwenang serta profesional. Setelah dilakukan identifikasi dan asesmen oleh pihak profesional untuk memperoleh data peserta didik. Hasil identifikasi dan asesmen yang keluar, dijadikan dasar dalam menentukan program layanan akademik dan non akademik. Hal ini sesuai dengan yang di tertulis dalam pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif direktorat pembinaan PKLK pendidikan dasar. Menurut pedoman tersebut, hasil identifikasi dilakukan untuk menentukan jenis kebutuhan peserta didik ABK. Sedangkan asesmen berguna untuk menemukenali kondisi peserta didik ABK untuk menentukan program pendidikan dan atau intervensi yang berguna untuk potensi yang dimilikinya

(PKLK, 2013:19-21).

Selain identifikasi dan asesmen di lakukan oleh pihak yang berwenang, pihak sekolah juga melakukan asesmen dengan cara mengobservasi calon peserta didik ABK serta wawancara kepada orang tua calon peserta didik. Hal ini sesuai dengan strategi pelaksanaan asesmen berdasarkan pendapat Budiyono (2013:58). Asesmen dapat dilakukan dengan observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku khusus ABK. Sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali informasi melalui tanya jawab (PKLK,2013: 58).

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada SDN Sumber Sari 1 Kota Malang Ditinjau dari Kurikulum

Hasil asesmen dijadikan penetapan kemampuan awal peserta didik ABK. Dari penetapan kemampuan awal peserta didik ini menjadi dasar dalam menentukan program pendidikan bagi ABK, seperti penetapan kurikulum bagi ABK. Masing-masing ABK memiliki karakteristik yang berbeda setiap individunya, selain itu kemampuan, potensi, ketidak mampuan, serta kemutuhan masing-masing ABK juga berbeda, oleh sebab itu program pendidikan, dalam hal ini adalah kurikulum yang di pakai oleh masing-masing ABK juga berbeda dengan kurikulum standar nasional. Dari perbedaan tersebut, maka dibutuhkanlah kurikulum yang dapat mengakomodasi kebutuhan siswa tersebut.

Pada SDN Sumber Sari 1 juga dilakukan pengembangan kurikulum yang dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik ABK. GPK melakukan penyesuaian kurikulum dengan cara akomodasi, duplikasi, omisi, dan substitusi. Dan aspek yang menjadi sasaran dalam pengembangan kurikulum ini adalah tujuan, materi, proses dan evaluasi pembelajaran. Jadi GPK hanya meminta KI dan KD untuk kurikulum 2013, dan SK dan KD untuk kurikulum KTSP. Untuk selanjutnya, pengembangan dari KI KD ataupun SK KD tersebut dilakukan oleh GPK.

Hal ini sesuai dengan pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif pada komponen kurikulum. Kurikulum akomodatif ini menyesuaikan bakat, minat, dan potensi ABK (PKLK, 2013:23). Berdasarkan pedoman umum tersebut, sekolah berhak melakukan pengembangan kurikulum akomodatif (PKLK, 2013:23). Melalui kurikulum akomodatif tersebut, pengembangan kurikulum dapat dilakukan pada aspek tujuan, materi, proses dan evaluasinya (PKLK, 2013:23).

Dengan adanya pengembangan kurikulum akomodatif yang berbeda setiap peserta didik ABK, membuat GPK bekerjasama dengan guru kelas merencanakan PPI. Pembuatan PPI didasarkan pada hasil asesmen ABK. Mengenai kerjasama antara GPK dan guru kelas dalam penyusunan PPI ini sesuai dengan pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh PKLK, yaitu penyusunan PPI dilakukan melalui kerjasama antara guru kelas dan GPK (PKLK: 2013: 29).

Peserta didik ABK yang menempuh pendidikan pada sekolah inklusi bukan hanya memperoleh layanan akademik saja tetapi juga mendapatkan layanan kekhususan yang termuat dalam kurikulum kekhususan. Di SDN Sumbersari 1 ini, peserta didik ABK diberikan layanan khusus berupa bina diri dan terapi. Layanan khusus ini menyesuaikan dengan kebutuhan ABK. Layanan ini tidak menggunakan jam khusus, melainkan disisipkan pada materi pelajaran. Penyelenggaraan layanan kekhususan ini sesuai dengan pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusi oleh PKLK. Layanan ini digunakan untuk mengatasi kelainan yang disandanginya atau mengoptimalkan potensi khusus peserta didik ABK yang harus dikembangkan (PKLK, 2013: 28).

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada SDN Sumbersari 1 Kota Malang Ditinjau Dari Kegiatan Pembelajaran yang Dilakukan

PPI yang telah disusun, kemudian dipergunakan dalam pembelajaran di ruang sumber, karena di SD Sumbersari 1, peserta didik yang tidak bisa mengikuti pembelajaran di kelas reguler dan menggunakan kurikulum akomodatif, maka pembelajaran dilakukan di ruang sumber. Pembelajaran di ruang sumber pun langsung di tangani oleh GPK, karena GPK dianggap oleh guru kelas dapat menangani ABK lebih baik.

Pembelajaran oleh GPK untuk ABK di ruang sumber ini sesuai dengan pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif dari PKLK. Dalam melaksanakan tugasnya, GPK melaksanakan kegiatan pembelajaran khusus di ruang sumber bagi peserta didik ABK yang membutuhkan (PKLK: 2013: 30).

Sebelum memulai kegiatan pembelajaran di kelas reguler, guru kelas membuat perangkat pembelajaran dengan memertimbangkan kebutuhan peserta didik ABK yang berbeda antar individunya. Pada awalnya peserta didik diberikan materi seperti teman-teman reguler lainnya, jika tidak bisa mengikuti, maka materi yang diterima oleh ABK anak di turunkan tingkat kesulitannya.

Media pembelajaran sebagai sarana penyampai materi masih kurang berfungsi secara optimal. Kurang dioptimalkannya media pembelajaran dalam proses pembelajaran ini tidak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh PKLK. Dalam proses pembelajarannya, guru menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya (PKLK, 2013:33).

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada SDN Sumbersari 1 Kota Malang Ditinjau dari Pengelolaan Kelas

Adanya penempatan peserta didik ABK di sekolah ini di disesuaikan dengan kebutuhan ABK serta jadwal yang telah disepakati antara GPK, guru kelas dan kepala sekolah. Dalam penempatan ABK di SDN Sumbersari 1 ini ada 4 macam, yaitu (1) kelas reguler penuh, untuk kelas VI dan kelas 1 dengan peserta didik tunadaksa, (2) kelas khusus dengan berbagai penintegrasian untuk ABK kelas V dan VI, (3) kelas reguler dengan *pull out* untuk kelas 1 dengan peserta didik *speech delay* dan ABK kelas II, (4) kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out* untuk ABK kelas III.

Model penempatan peserta didik di sekolah inklusi tersebut sesuai dengan Depdiknas (dalam Astuti, 2009: 11). Dalam sekolah inklusi ada 6 model penempatan peserta didik ABK yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk ABK, 5 diantaranya telah dipakai oleh SD Sumbersari 1 ini.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada SDN Sumbersari 1 Kota Malang Ditinjau dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adanya penempatan peserta didik ABK di sekolah inklusi ini, secara otomatis ada pembagian jadwal antara GPK, mengingat di sekolah ini terdapat 2 GPK. Pembagian jadwal antar GPK ini sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh PKLK. GPK memiliki tugas pokok untuk membangun sistem koordinasi dan kolaborasi antara tenaga pendidik, dalam hal ini adalah antar GPK (PKLK:, 2013: 30)

Seperti hasil observasi serta wawancara kepada Bu Indri selaku GPK merasa kalau jumlah GPK di SDN Sumbersari 1 ini tidak sesuai dengan jumlah peserta didik ABK. Namun jumlah GPK di sekolah inklusi ini, menurut permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 10 ayat 1, bahwasannya "Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan

pendidikan inklusif”.

Untuk meningkatkan kompetensi GPK dalam menangani ABK, minimal satu bulan sekali dinas pendidikan kota mengadakan pertemuan rutin. Dalam kegiatan ini biasanya ada kegiatan diskusi mengenai permasalahan ABK. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kompetensi GPK ini sesuai dengan pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pemerintah kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan penyelenggara pendidikan inklusif (PKLK, 2013: 31)

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada SDN Sumpalsari 1 Kota Malang Ditinjau dari Evaluasi dan Sistem Laporan Hasil Belajar

Proses laporan hasil belajar peserta didik ABK ada 2 macam, yaitu angka dan deskriptif. Laporan belajar berupa angka di buat oleh GPK kemudian diserahkan kepada guru reguler untuk diproses lebih lanjut. Nilai berbentuk angka ini diperoleh melalui ulangan harian, UTS dan UAS. Sedangkan proses laporan hasil belajar berupa deskriptif dikerjakan oleh GPK. Laporan deskriptif ini memuat perkembangan kemajuan atas program yang telah ABK lakukan, seperti sejauh apa program yang sudah berjalan, seperti apa perkembangan peserta didik ABK.

Mengenai laporan hasil belajar berupa deskriptif dan angka ini sesuai dengan Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, bahwa laporan belajar sekolah inklusif untuk ABK berupa angka dan narasi (PKLK, 2013:35) Kenikmatan kelas ABK ditentukan untuk berkelanjutan. Mengenai peserta didik ABK yang tidak boleh tinggal kelas ini sesuai dengan pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, bahwa ABK yang menggunakan kurikulum akomodatif di bawah standar nasional, kenaikan kelasnya didasarkan pada usia kronologis (PKLK, 2013: 34)

Faktor Penghambat dan Pendukung Pendidikan Inklusif di SDN Sumpalsari 1 Kota Malang

Faktor pendukung pendidikan inklusi di SDN Sumpalsari ini adalah dari teman sebaya, masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Dalam hal ini, teman sebaya yang memahami ABK, akan membantu peserta didik ABK dalam proses sosialisasinya, serta dapat membantu peserta didik ABK memahami materi yang diterima di kelas reguler. Orang tua juga berperan dalam mendukung terselenggaranya pendidikan inklusi bagi peserta didik ABK. Orang tua

harus tanggap, kritis dan terlibat dalam pelaksanaan program bagi ABK.

Pihak pemerintah sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi ini memberikan bantuan seperti ruang sumber, media pembelajaran dan beasiswa bagi ABK. Selain itu, pemerintah berperan mendorong tenaga pendidik di sekolah ini agar dapat meningkatkan kompetensi di bidang ke-Inklusifan serta ABK. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan tentang ke-Inklusifan serta ABK.

Faktor pendukung atas terselenggaranya pendidikan inklusif tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryo (2009: 6), bahwasannya kesadaran, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif ini. Dengan adanya masyarakat yang sadar dan mendukung pendidikan inklusi ini, inklusi akan lebih berkembang karena bisa di terima oleh masyarakat.

Selain terdapat faktor pendukung di atas, terdapat pula faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan temuan penelitian, faktor penghambat tersebut adalah masih adanya orang tua yang tidak bersikap kooperatif terhadap sekolah untuk ikut serta dalam program layanan peserta didik ABK, serta kurang jelasnya peranturan pemerintah mengenai pendidikan inklusif..

Aturan dari pemerintah yang dirasa belum jelas bagi guru di SDN Sumpalsari ini menjadi penghambat dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Karena dengan aturan yang belum jelas ini, ruang lingkup sekolah sebagai sekolah inklusi juga dirasa masih belum jelas.

Penutup

Kesimpulan

Setiap tahunnya SDN Sumpalsari 1 menerima ABK maksimal 2. Untuk menangani ABK, tenaga pendidik dan kependidikan mendapatkan pelatihan pendidikan inklusif dari dinas pendidikan, dan dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi satu sama lain. Kurikulum untuk ABK menggunakan kurikulum akomodatif dan ada layanan kekhususan. Pengelolaan kelas disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik ABK. Proses pembelajaran disesuaikan dengan rancangan PPI. Peserta didik ABK ditentukan berkelanjutan, dan ada 2 jenis laporan hasil belajar, yaitu angka dan deskriptif. Faktor pendukung adalah kepedulian orangtua, masyarakat, serta pemerintah, faktor penghambat adalah orang tua yang tidak peduli serta ketidakjelasan peraturan dari pemerintah.

Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu: (1) guru reguler maupun GPK diharapkan mengikuti

pelatihan tentang pendidikan inklusif dan (2) pemerintah membuat aturan yang jelas mengenai pendidikan inklusi

Daftar Rujukan

- Budiyono, dkk. 2013. Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar.
- Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar. 2013. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Jakarta: Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar
- Moleong, L. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa. Kelompok Kerja Inklusi Jawa Timur 2009. (Online), (<http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2013/07/Permen-No.-70-2009-tentang-pendidikan-inklusif-memiliki-kelainan-kecerdasan.pdf>), diakses 5 November 2014.
- Sunaryo. 2009. Manajemen Pendidikan Inklusif (Kebijakan dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa). Jurna PLB FIP UPI, (Online), 6, (http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195607221985031-SUNARYO/Makalah_Inklusi.pdf), diakses 5 November 2014
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Online), (http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386157387.pdf), diakses 5 November 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Online), (<http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf>), diakses 5 November 2014.
- Wiyono, B. B. 2007. Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Action Research. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang